

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Annisa. 2018. *Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI.
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nela, Wa Ode. 2017. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010-2015*. Skripsi. Kendari: Universitas Halu Oleo.
- Puspita Dewi Tri. 2016. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reatoran, Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2020. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal* (Edisi Revisi). Bandung: Rekayasa Sains
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi ke 11 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Sujarweni, Wiratna, V. 2018. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,cv.
- Tersiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.

*Peraturan Daerah DKI Jakarta, Nomor 12, Tahun 2011, tentang Pajak Reklame.*

*Peraturan Daerah DKI Jakarta, Nomor 11, Tahun 2010, tentang Pajak Hotel.*

*Peraturan Daerah DKI Jakarta, Nomor 11, Tahun 2011, tentang Pajak Hotel.*

*Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Nomor 154, Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pnedapatan daerah.*

*Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28, Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

*Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28, Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

*Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 33, Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

